

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
 NOMOR PM 71 TAHUN 2013

---

Contoh 1

Nomor : ..... 20...  
 Lampiran :  
 Perihal : Permohonan Izin Usaha Kepada  
 Perusahaan *Salvage* dan/ Perusahaan  
 atau Pekerjaan Bawah Air Yth. Direktur Jenderal Perhubungan  
 Laut

di

JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air, bersama ini kami PT. ... mengajukan permohonan izin usaha perusahaan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air.
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas persyaratan untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
  - a. *copy* akta pendirian perusahaan;
  - b. *copy* Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. *copy* surat keterangan domisili;
  - d. *copy* KTP penanggung jawab;
  - e. *copy* sertifikat kompetensi tenaga penyelam;
  - f. bukti kepemilikan peralatan kerja; dan
  - g. *copy grosse* akte kapal.
3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

## Contoh 2

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
NOMOR :**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN USAHA KEPADA PT. ...  
SEBAGAI PERUSAHAAN *SALVAGE* DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,**

**Membaca** : Surat Permohonan PT. ....  
Nomor : .....

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
  3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
  4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA KEPADA PT. ... SEBAGAI PERUSAHAAN *SALVAGE* DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR.**

**PERTAMA** : Memberikan izin usaha perusahaan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air kepada:

Nama Perusahaan :  
Alamat Kantor Perusahaan :  
Pengesahan Badan Hukum :  
Pimpinan/Penanggung Jawab :  
Jabatan Penanggung Jawab :  
Nomor Pokok Wajib Pajak :

- KEDUA** : Kewajiban pemegang izin usaha:
1. mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di sektor Perhubungan;
  2. mengajukan permohonan izin kegiatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap akan melaksanakan kegiatan;
  3. mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri setiap melaksanakan kegiatan;
  4. menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan tentang kegiatan dan keadaan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
  5. bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
  6. melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap kali terjadi perubahan yang berkaitan dengan perusahaannya.
- KETIGA** : Surat izin usaha ini dapat dicabut apabila pemegang surat izin usaha tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan/atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya.
- KEEMPAT** : Surat izin usaha ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal :  
-----

-

**LAUT** DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN

(.....)

## Contoh 3

Nomor : ..... 20.....  
 Lampiran :  
 Perihal : Permohonan Izin Usaha Kepada  
 Perusahaan *Salvage* dan/ Yth. Direktur Jenderal  
 atau Pekerjaan Bawah Air Patungan (*Joint Venture*) Laut  
 Perhubungan

di

JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air, bersama ini kami PT. ... mengajukan permohonan izin usaha perusahaan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air patungan (*joint venture*).
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas persyaratan untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
  - a. *copy* akta pendirian perusahaan;
  - b. *copy* Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. *copy* surat keterangan domisili;
  - d. *copy* KTP penanggung jawab;
  - e. *copy* surat persetujuan penanaman modal asing dari instansi yang berwenang;
  - f. *copy* sertifikat kompetensi tenaga penyelam;
  - g. bukti kepemilikan peralatan kerja; dan
  - h. *copy grosse* akte kapal.
3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

## Contoh 4

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
NOMOR :**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN USAHA KEPADA PT. ... SEBAGAI PERUSAHAAN *SALVAGE*  
DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR PATUNGAN (*JOINT VENTURE*)**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,**

- Membaca :**
1. Surat Permohonan PT. ....  
Nomor : .....
  2. Surat persetujuan penanaman modal asing .....  
Nomor : .....
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
  3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
  4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun .... tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA KEPADA PT. ... SEBAGAI PERUSAHAAN *SALVAGE* DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR PATUNGAN (*JOINT VENTURE*).

**PERTAMA :** Memberikan izin usaha perusahaan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air patungan (*joint venture*) kepada:

Nama Perusahaan :  
 Alamat Kantor Perusahaan :  
 Pengesahan Badan Hukum :  
 Pimpinan/Penanggung Jawab :

Jabatan Penanggung Jawab :  
Nomor Pokok Wajib Pajak :

**KEDUA** : Kewajiban pemegang izin usaha :

1. mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di sektor Perhubungan;
2. mengajukan permohonan izin kegiatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap akan melaksanakan kegiatan;
3. mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri setiap melaksanakan kegiatan;
4. menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan tentang kegiatan dan keadaan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
6. melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap kali terjadi perubahan yang berkaitan dengan perusahaannya.

**KETIGA** : Izin usaha perusahaan ini dapat dicabut apabila pemegang surat izin usaha tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan/atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya.

**KEEMPAT** : Izin usaha ini berlaku sampai dengan ... dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal :

-----  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN

LAUT

(.....)

## Contoh 5

Nomor : ....., ..... 20.....

Lampiran :

Perihal : Permohonan Izin  
Kegiatan *Salvage*

Kepada

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan  
Laut  
di  
JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air, bersama ini kami PT. ... mengajukan permohonan izin kegiatan *salvage*.
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas persyaratan untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
  - a. rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan, metode kerja, tenaga kerja, peralatan kerja, dan wilayah kerja kegiatan yang ditandai dengan posisi koordinat geografis serta dilengkapi peta lokasi kerja;
  - b. *copy* kontrak kerja dan/atau *Letter of Intent (LOI)* dari pemberi kerja;
  - c. *copy* izin usaha perusahaan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air; dan
  - d. daftar kapal kerja yang dilengkapi dengan *crew list*, *copy* sertifikat/dokumen operasional kapal yang masih berlaku.
3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan diucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

## Contoh 6

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
NOMOR :**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN KEGIATAN *SALVAGE* KEPADA PT. ...**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,**

**Membaca** : Surat Permohonan PT. ....  
Nomor : .....

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun .... tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
TENTANG PEMBERIAN IZIN KEGIATAN *SALVAGE* KEPADA PT.**

**PERTAMA** : Memberikan izin kegiatan *salvage* kepada:

Nama Perusahaan :  
Alamat :  
Izin Usaha :

**KEDUA** : Untuk melaksanakan kegiatan *salvage* berupa ...



**KETIGA** : Kapal kerja yang digunakan dengan data sebagai berikut:

No.	Nama Kapal	Bendera	GT/NT	Call Sign	Capt./Crew

**KEEMPAT** : Kewajiban pemegang izin kegiatan:

- a. melengkapi dengan Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA) untuk penggunaan kapal kerja berbendera asing;
- b. melengkapi dengan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penggunaan tenaga kerja asing;
- c. mendapatkan *Clearance In* dan *Clearance Out* atas kapal kerja yang digunakan kepada Syahbandar di pelabuhan terdekat;
- d. menjaga kelestarian lingkungan laut;
- e. memasang rambu-rambu navigasi selama pelaksanaan pekerjaan guna menjamin keselamatan pelayaran;
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dikeluarkannya izin kegiatan ini atau dalam 2 (dua) minggu setelah selesai kegiatan;
- g. mentaati ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air;
- h. menyediakan fasilitas yang diperlukan bagi pengawas yang ditunjuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- i. dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah memperoleh izin kegiatan, perusahaan harus telah melaksanakan secara nyata kegiatannya.

**KELIMA** : Izin kegiatan ini dapat dicabut apabila pemegang izin kegiatan tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan/atau melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

**KEENAM** : Pengawasan dan pelaporan kegiatan *salvage* dilaksanakan oleh ....

**KETUJUH** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

pada tanggal : \_\_\_\_\_

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN**

**LAUT**

(.....)

**Tembusan:**

1. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;
2. Kepala Kantor UPT di pelabuhan terdekat.

**Contoh 7****Nomor** : ..... 20.....**Lampiran** :**Perihal** : Laporan**Kepada****Yth. Direktur Jenderal Perhubungan  
Laut  
di  
JAKARTA**

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air pada Pasal ... ayat (...), bersama ini kami PT. ... menyampaikan laporan tindakan yang telah dilakukan sebagai berikut:
  - a. ... ;
  - b. ... ;
  - c. ... ;
  - d. dst.
2. Demikian laporan kami sampaikan, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan diucapkan terima kasih.

PT. ....

(.....)  
Penanggung Jawab

## Contoh 8

**SURAT KETERANGAN  
PEMBEBASAN ATAS KEWAJIBAN PENYINGKIRAN  
KERANGKA KAPAL DAN/ATAU MUATANNYA MILIK PT. ...**

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP : .....

Jabatan : Kepala Kantor .....

Dengan ini menerangkan bahwa:

- a. berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan terhadap keberadaan kerangka kapal dan/atau muatannya ditetapkan lokasi kerangka kapal berada pada tingkat gangguan III dengan kedalaman perairan ... meter;
- b. berdasarkan berita acara hasil pengangkatan dan/atau pemindahan muatan kapal dan/atau bahan bakar kapal yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan;
- c. diberikan pembebasan atas kewajiban pengangkatan kerangka kapal kepada PT. ... selaku pemilik kapal ..., dan tidak menuntut dalam bentuk apapun apabila ada pihak lain yang berkeinginan mengangkat dan memanfaatkan kerangka kapal ... dimaksud.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal : \_\_\_\_\_

KEPALA KANTOR .....

(.....)

**Tembusan:**

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

## Contoh 9

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR .....

Nomor:

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT LAIN (*DUMPING AREA*)  
UNTUK KERANGKA KAPAL DAN/ATAU MUATANNYA

KEPALA KANTOR .....,

Memperhatikan: 1. hasil rapat koordinasi ...;  
2. batas-batas pelabuhan ...;  
3. dst.

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan penyingkiran kerangka kapal dan/atau muatannya, perlu ditetapkan tempat lain (*dumping area*) untuk kerangka kapal dan/atau muatannya yang tidak mengganggu alur pelayaran dan tidak mengganggu operasional pelabuhan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

3. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut;

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR ... TENTANG PENETAPAN TEMPAT LAIN (*DUMPING AREA*) UNTUK KERANGKA KAPAL DAN/ATAU MUATANNYA

PERTAMA : Batas-batas koordinat geografis tempat lain (*dumping area*) untuk kerangka kapal dan/atau muatannya sebagai berikut:

- a.
- b.
- c.
- d.

**KEDUA** : Batas-batas koordinat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bersifat sementara dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal:

---

Kepala Kantor ...

(-----)

Tembusan:

Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

## Contoh 10

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR ...

Nomor:

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN PENETAPAN TEMPAT LAIN (*DUMPING AREA*)  
UNTUK KERANGKA KAPAL DAN/ATAU MUATANNYA

KEPALA KANTOR ...,

- Memperhatikan** : 1. hasil rapat koordinasi ...;  
2. batas-batas pelabuhan ...;  
3. dst.
- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan keputusan penetapan tempat lain (*dumping area*) untuk kerangka kapal dan/atau muatannya, perlu ditetapkan keputusan pencabutan penetapan tempat lain (*dumping area*) untuk kerangka kapal dan/atau muatannya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
3. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR ... TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PENETAPAN TEMPAT LAIN (*DUMPING AREA*) UNTUK KERANGKA KAPAL DAN/ATAU MUATANNYA
- PERTAMA** : Mencabut Keputusan Kepala Kantor ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Tempat Lain (*Dumping Area*) Untuk Kerangka Kapal dan/atau Muatannya.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

\_\_\_\_\_  
Kepala Kantor ...

( ----- )

Tembusan:

Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Contoh 11

Nomor : ....., ..... 20...

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Peringatan Ke ...

Kepada

Yth. Direktur PT. ...

di

TEMPAT

1. **Memperhatikan:**
  - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
  - c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air;

Dengan ini diperingatkan kepada Saudara selaku pemilik kapal ... yang kandas/tenggelam di perairan ..., agar segera melakukan penyingkiran ke tempat lain (*dumping area*) yang tidak mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran, dan tidak mengganggu operasional pelabuhan.

2. Tersebut butir 1 (satu) di atas, bersama ini disampaikan bahwa apabila dalam jangka waktu ... hari, Saudara tidak melakukan penyingkiran, maka:
  - a. dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. apabila keberadaan kapal/kerangka kapal dan/atau muatannya mengakibatkan kerugian/kecelakaan/korban jiwa/kerusakan dan pencemaran lingkungan menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya untuk memberikan ganti rugi.



3. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Kantor ...

-----  
Tembusan:  
Direktur Jenderal Perhubungan Laut

## Contoh 12

Nomor : ..... , 20 .....

Klasifikasi :

Lampiran : Kepada

Perihal : Surat Permohonan  
Pelimpahan Penyingkiran Yth. Kepala Kantor ...  
Kerangka Kapal

di

TEMPAT

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang *Salvage* dan/atau Pekerja Bawah Air, bersama ini kami PT. ... mengajukan permohonan pelimpahan penyingkiran kerangka kapal, dengan data sebagai berikut:
  - a. nama :.....
  - b. lokasi :.....
  - c. posisi koordinat :.....
  - d. wilayah :.....
2. Terkait hal tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan persyaratan sebagai berikut:
  - a. *copy* surat izin usaha perusahaan *salvage*;
  - b. *copy* akta pendirian perusahaan;
  - c. *copy* NPWP;
  - d. surat keterangan domisili perusahaan;
  - e. daftar peralatan;
  - f. kualifikasi tenaga kerja;
  - g. jadwal dan metode kerja;
  - h. rekomendasi Pemerintah Daerah, apabila kerangka kapal hasil temuan dan tidak diketahui pemiliknya.
3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan diucapkan terima kasih.

PT. ....

-----

Direktur Utama

--

**Contoh 13****KEPUTUSAN KEPALA KANTOR ...****NOMOR :****TENTANG****PEMBERIAN PELIMPAHAN PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL  
DAN/ATAU MUATANNYA KEPADA PT. ...****KEPALA KANTOR ...,**

**Membaca** : 1. Surat permohonan PT. ...  
 2. Berita acara peninjauan lokasi kerangka kapal Nomor ... tanggal ...  
 ...  
 3. Berita acara serah terima kerangka kapal dari pemilik kapal kepada Kepala Kantor ... Nomor ... tanggal ... .

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);  
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);  
 3. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut;  
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR ... TENTANG PELIMPAHAN PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL ... DI PERAIRAN ... KEPADA PT. ...**

**PERTAMA** : Memberikan pelimpahan kepada:

Nama perusahaan :  
 Alamat kantor perusahaan :  
 Pengesahan badan hukum :  
 Pimpinan/penanggung jawab :  
 Jabatan penanggung jawab :  
 Nomor Pokok Wajib Pajak :  
 Izin usaha :

**KEDUA** : Melaksanakan pengangkatan kerangka kapal dengan data sebagai berikut:

Nama kerangka kapal :  
.....  
Posisi koordinat :  
.....  
Lokasi perairan :  
.....

**KETIGA** : Kewajiban pemegang pelimpahan:

- a. bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko akibat keberadaan kerangka kapal ... sejak tanggal dikeluarkannya pelimpahan pengangkatan kerangka kapal ini;
- b. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal dikeluarkannya pelimpahan pengangkatan kerangka kapal ini perusahaan sudah secara nyata melaksanakan kegiatan pengangkatan dan pembersihan terhadap kerangka kapal tersebut;
- c. mematuhi semua aturan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengangkatan dan pembersihan kerangka kapal;
- d. hasil kegiatan pengangkatan dan pembersihan kerangka kapal ini harus dilengkapi dengan berita acara hasil pengangkatan dan pembersihan oleh UPT pelabuhan terdekat ... yang menyatakan bahwa lokasi tersebut sudah bersih dan aman untuk aktifitas pelayaran;
- e. pelimpahan pengangkatan kerangka kapal ini dapat dicabut apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan perusahaan belum melaksanakan kegiatan ini.

**KEEMPAT** : Pengawasan terhadap pelimpahan ini, dilakukan oleh ... .

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : \_\_\_\_\_

KEPALA KANTOR ...

.....

**Tembusan:**

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;
3. Gubernur/Walikota/Bupati setempat.

## Contoh 14

**BERITA ACARA PENINJAUAN LOKASI  
PEYINGKIRAN KERANGKA KAPAL ..... DAN PENGANGKATAN  
SARANA BANTU NAVIGASI-PELAYARAN (SBNP)**

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (...-...-...) telah dilakukan peninjauan lokasi bekas penyingkiran kerangka kapal ... dan pengangkatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP), sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor ... tentang Pelimpahan Penyingkiran Kerangka Kapal ... di Perairan ... Kepada PT. ... Nomor ... tanggal ... .

Untuk melaksanakan kegiatan penyingkiran kerangka kapal ... yang dilakukan oleh:

Nama perusahaan : .....  
 Alamat : .....  
 Izin usaha : .....

Dari hasil peninjauan lokasi diperoleh hal-hal sebagai berikut:

1. Lokasi bekas keberadaan kerangka kapal ... telah bersih/masih tersisa \*) dari kerangka kapal tersebut dan tidak terjadi pencemaran laut;
2. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) telah diangkat dari lokasi kerangka kapal;
3. Kondisi teknis lokasi pada saat dilakukan pemeriksaan dengan data sebagai berikut:
  - a. kedalaman perairan ...;
  - b. draft kapal maksimum yang dapat dilalui adalah ... meter pada saat surut terendah;

demikian berita acara peninjauan lapangan terhadap pengangkatan kerangka kapal ... ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

....., 20.....

Petugas Kantor UPT terdekat ...

1. ....
2. ....

Petugas Kantor Distrik Navigasi

1. ....
2. ....

Mengetahui

Kepala Kantor UPT Terdekat

Kepala Kantor Distrik Navigasi

.....

.....

**Contoh 15**

Nomor : ....., ..... 20.....

Lampiran :

Perihal : Permohonan Izin Kegiatan Kepada  
Pekerjaan Bawah Air

Yth. Direktur Jenderal  
Perhubungan Laut

di

JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air, bersama ini kami PT. ... mengajukan permohonan izin kegiatan pekerjaan bawah air.
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
  - a. rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan, metode kerja, tenaga kerja, peralatan kerja, dan wilayah kerja kegiatan yang ditandai dengan posisi koordinat geografis serta dilengkapi peta lokasi kerja;
  - b. *copy* kontrak kerja dan/atau *Letter of Intent (LOI)* dari pemberi kerja;
  - c. *copy* izin usaha perusahaan *salvage* dan/atau pekerjaan bawah air;
  - d. daftar kapal kerja yang dilengkapi dengan *crew list*, *copy* sertifikat/dokumen operasional kapal yang masih berlaku.
3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan diucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

## Contoh 16

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Nomor :

**TENTANG****PEMBERIAN IZIN KEGIATAN PEKERJAAN BAWAH AIR KEPADA PT. ...****DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,**

**Membaca** : Surat Permohonan PT. ....  
 Nomor : .....

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

3. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut;

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PEMBERIAN IZIN KEGIATAN PEKERJAAN BAWAH AIR KEPADA PT. ...**

**PERTAMA** : Memberikan izin kegiatan pekerjaan bawah air kepada:

Nama perusahaan :  
 Alamat :  
 Izin usaha :

**KEDUA** : Untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan bawah air berupa ... .



**KETIGA** : Kapal kerja yang digunakan dengan data sebagai berikut:

No.	Nama Kapal	Bendera	GT/NT	Call Sign	Capt./Crew

**KEEMPAT** : Kewajiban pemegang izin kegiatan:

- a. menyampaikan Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA) untuk penggunaan kapal asing;
- b. menyampaikan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penggunaan tenaga kerja asing;
- c. mendapatkan *Clearance In* dan *Clearance Out* atas kapal kerja yang digunakan kepada Syahbandar setempat;
- d. menjaga kelestarian lingkungan laut;
- e. memasang rambu-rambu navigasi selama pelaksanaan pekerjaan guna menjamin keselamatan pelayaran;
- f. melaporkan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dikeluarkannya surat persetujuan kegiatan ini atau dalam 2 (dua) minggu setelah selesai kegiatan;
- g. mentaati ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air;
- h. menyediakan fasilitas yang diperlukan bagi pengawas yang ditunjuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- i. dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah memperoleh surat izin kegiatan, perusahaan harus telah melaksanakan secara nyata kegiatannya.

**KELIMA** : Surat izin kegiatan ini dapat dicabut apabila pemegang surat izin kegiatan tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan/atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya.

**KEENAM** : Pengawasan dan pelaporan kegiatan pekerjaan bawah air dilakukan oleh ... .

**KETUJUH** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : \_\_\_\_\_

LAUT

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN**

(.....)

**Tembusan:**

1. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;
2. Kepala UPT Pelabuhan Terdekat.

---

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

**E.E. MANGINDAAN**